

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Alkohol merupakan senyawa kimia yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Alkohol biasa terkandung dalam obat-obatan, kosmetik maupun minuman seperti *cocktail*. Konsumsi alkohol yang berlebih akan membawa dampak buruk bagi tubuh kita. Dampak jangka pendek akibat konsumsi alkohol yang berlebih adalah keracunan alkohol (intoksikasi alkohol) dan kerusakan organ tubuh yang diikuti dengan kerusakan sistem saraf di otak. Dampak terburuknya adalah menyebabkan kematian. Dampak buruk dari alkohol itulah yang menjadi alasan dikeluarkannya peraturan terkait peredaran alkohol agar alkohol tidak disalahgunakan masyarakat.

Salah satu turunan alkohol yang sering disalahgunakan adalah etanol. Etanol merupakan senyawa turunan alkohol yang biasa ditemukan dalam produk minuman keras. Efek dari konsumsi minuman keras tersebut adalah memabukkan. Apabila seseorang dalam keadaan mabuk, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih dan dapat melakukan hal buruk karena hilangnya kesadaran. Untuk menghindari penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah terkait hal serupa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur terkait tindak pidana minuman keras yaitu Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 dan Pasal 539. Pasal tersebut mengatur terkait penyalahgunaan minuman keras dengan cara menjual dan memberikannya kepada anak di bawah umur serta penyalahgunaan minuman keras yang berujung pada pelanggaran ketertiban umum.

Minuman keras pada dasarnya adalah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat pada hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidaksadarannya adalah peminum mengomel sendiri sehingga tidak mengetahui hal apa yang sudah dilakukan ketika mabuk. Dalam jangka panjang, minuman keras akan merusak organ tubuh peminumnya.<sup>1</sup> Meski organ tubuh dapat terpengaruh minuman keras, namun yang paling banyak terpengaruh adalah saraf. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berpikir seseorang sehingga akan merusak akal.<sup>2</sup>

Organ yang menjadi dampak dari konsumsi minuman keras adalah akal. Akal merupakan bagian dari diri manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Akal harus selalu dijaga dan dilindungi serta digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal adalah dengan menjauhi dan tidak meminum

---

<sup>1</sup> Muhammad Syukron Maksum, *Suramnya Surga Indahnya Neraka* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), hlm. 209-210.

<sup>2</sup> Shubhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi)* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 75.

minuman keras. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemeliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah*. Ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dalam *maqashid syariah*. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut dapat dipelihara dengan baik. Sebaliknya, apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka yang akan diperoleh adalah mafsadat.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik tentunya ingin melindungi masyarakat, terutama generasi muda dari bahaya minuman keras. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara melarang peredaran minuman keras di wilayah Gresik. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Minuman Keras. Setelah 2 (dua) tahun disahkan, kemudian dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

Definisi minuman keras dalam peraturan daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah disebutkan di atas. Dalam Peraturan

---

<sup>3</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 159.

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.<sup>4</sup>

Apabila kita cermati, sudah lebih dari 1 (satu) dasawarsa peraturan daerah tersebut disahkan dan diundangkan, namun tampaknya masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut dan bahkan melanggarnya. Meskipun sudah ada payung hukum terkait minuman keras, namun penjualan, peredaran dan bahkan pesta minuman keras tetap ada, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Masyarakat pun dapat dengan mudah mendapatkan minuman keras di warung-warung yang ada di Gresik. Bahkan bagi beberapa orang, minuman keras tersebut menjadi lahan bisnis dengan keuntungan yang tinggi. Sang pemilik bisnis pun tidak perlu khawatir bisnisnya akan berjalan lambat dikarenakan bisnis tersebut sudah memiliki pelanggan dan tersebar dari mulut ke mulut.

Untuk mencegah agar korban minuman keras tidak bertambah, maka yang dilakukan satuan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah dengan melakukan razia di warung kopi yang disinyalir menjadi tempat transaksi minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di beberapa warung kopi di sudut Kota Gresik menyediakan minuman keras dengan berbagai bentuk.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

Razia tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kesucian Gresik sebagai Kota Santri.

Razia tersebut pun membuahkan hasil. Terbukti dengan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018 kasus pidana minuman keras mencapai angka yang cukup tinggi. Angka tertinggi pada tahun 2017 dimana terdapat 65 kasus terkait kepemilikan dan konsumsi minuman keras. Jenis minuman keras yang ditemukan pun bervariasi. Minuman keras tersebut dapat berupa arak, toak, anggur, bir, *whisky* bahkan oplosan. Kasus yang paling terbaru adalah sebanyak 3 (tiga) pemuda di Menganti, Kabupaten Gresik harus meregang nyawa dikarenakan menenggak minuman keras oplosan.

Atas dasar hal tersebut maka peredaran minuman keras menjadi masalah serius yang harus diperangi Pemerintah Kabupaten Gresik karena korban utama dari minuman keras adalah generasi muda. Antisipasi terhadap bahaya minuman keras harus dilakukan agar generasi muda tidak terjerumus dan ikut mengkonsumsi minuman dengan kadar etanol yang tinggi. Bentuk antisipasi yang dilakukan adalah dengan jalan melarang, mengawasi dan menegakkan hukuman apabila terjadi pelanggaran terkait minuman keras.

Jika kita tilik dari fakta yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan yang timbul adalah mengenai efektivitas peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras tersebut. Suatu peraturan dapat

dikatakan berhasil apabila pengaruhnya berhasil mengatur sikap dan perilaku seseorang. Hal ini juga dipengaruhi oleh kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang ada. Kepatuhan akan hukum yang dalam hal ini adalah peraturan daerah, seringkali dikaitkan dengan kesadaran hukum seseorang tersebut. Kesadaran hukum inilah yang nantinya akan menentukan apakah hukum sudah berfungsi dengan baik atau tidak, sehingga nantinya akan dapat diukur tingkat efektivitas hukum tersebut.<sup>5</sup>

Peraturan daerah tersebut dapat dianggap efektif apabila aparat penegak hukum dapat konsisten dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari masyarakat atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Apabila kedua hal tersebut sudah berjalan dengan baik, maka peraturan daerah tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait minuman keras dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras Ditinjau dari *Maqashid Syariah* (Studi di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)”**.

---

<sup>5</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 34-37.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan dan Kontribusi**

Terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Sedangkan kontribusi dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian ini digunakan untuk kepentingan kelulusan studi serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait larangan peredaran minuman keras di Kabupaten Gresik beserta tinjauan *maqashid syariah* terhadap hal tersebut.
2. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan proses penegakan hukum terkait dengan peredaran minuman keras.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait larangan peredaran dan penjualan minuman keras agar tidak menyalahgunakan dan bertindak sembarangan dengan meminum minuman keras.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengkaji penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan penelitian dimana masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda akan tetapi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis antara lain:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Setiawan Fu'adi (2015) dengan judul Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Perspektif *Siyasah Shar'iyah*. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana tinjauan *siyasah shar'iyah* terhadap respon masyarakat serta



implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.<sup>6</sup>

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L (2016) dengan judul Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas serta kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo.<sup>7</sup>

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Risnawati Darwis (2017) dengan judul Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras. Fokus penelitian ini adalah mengenai faktor, sanksi hukum serta upaya Polsek sebagai penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras (*ballo*) secara ilegal di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Malino).<sup>8</sup>

Fokus beberapa penelitian tersebut di atas berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan Penulis. Fokus penelitian yang dilakukan Peneliti adalah terkait efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras ditinjau

---

<sup>6</sup> Setiawan Fu'adi, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Perspektif *Siyasah Shar'iyah*," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18 No. 1, (Juni, 2015), hlm. 100-105.

<sup>7</sup> Muhammad Ilmar L, "Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2016), hlm. 8.

<sup>8</sup> Risnawati Darwis, "Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras" (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar 2017), hlm. 7.

dari *maqashid syariah* dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Karena berkaitan dengan efektivitas hukum, maka data awal yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian barulah dilanjutkan dengan data primer. Dalam penelitian ini diperlukan metode-metode ilmiah untuk diteliti yang kemudian dianalisis untuk dapat mempelajari satu atau beberapa dari gejala hukum yang ada.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh, dikumpulkan dan diambil secara langsung oleh Penulis dari sumber yang pertama.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian hukum sosiologis bukanlah literature, melainkan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 43.

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hlm. 84.

data lapangan. Data tersebut dapat diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan.<sup>11</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hasil wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Narasumber tersebut berasal dari salah satu anggota Tim yang dibentuk Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Dokumen atau data yang diperoleh Penulis secara langsung di lapangan dari narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan acuan tambahan bagi Penulis sebagai pendukung dari data primer. Data yang terkait dengan penelitian ini antara lain al-Quran, hadis dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Data juga diambil oleh Penulis dari buku teks dan literatur lainnya terkait dengan minuman keras

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 129.

serta mengenai tindakan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman keras. Data yang dibutuhkan bukan hanya data yang berkaitan dengan minuman keras, akan tetapi termasuk juga data yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan konsep serta teorinya.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data yang menguatkan penjelasan dari data primer dan data sekunder. Data tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan (*field research*) yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan (*library research*).

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penanya dengan narasumber baik secara langsung dengan bertatap muka ataupun melalui surat elektronik (*email*). Wawancara ditujukan untuk menggali pemahaman dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai fokus penelitian. Wawancara juga bisa disebut sebagai proses percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan maksud untuk mengkonstruksi orang, kejaidan, kegiatan organisasi,

motivasi dan sebagainya.<sup>12</sup> Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin (*guided interview*) dimana Penulis sudah menyiapkan pedoman/pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pihak yang berkaitan dan berwenang melaksanakan Peraturan Daerah yang dalam hal ini adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Selain wawancara dengan narasumber, pengumpulan data yang dilakukan Penulis juga dilakukan terhadap masyarakat. Terhadap penelitian yang dilakukan kepada masyarakat, Penulis memilih teknik *sampling*. Teknik *sampling* dipilih karena Penulis dapat mengumpulkan data dari subjek penelitian dengan efisien dan efektif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik *non random sampling* yaitu *purposive sampling* (sampel bertujuan). Bertujuan dalam penelitian ini artinya adalah Penulis mengambil sampel secara subjektif dengan anggapan bahwa sampel tersebut mencerminkan dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

Teknik *sampling* tersebut diaplikasikan dalam penggunaan kuesioner. Kuesioner adalah salah satu instrumen pengumpulan data yang berisi rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan secara tertulis. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka (*open questions*) dan pertanyaan

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 155.

<sup>13</sup> Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 72.

tertutup (*closed questions*).<sup>14</sup> Pertanyaan tersebut nantinya akan diajukan kepada responden yang memenuhi kriteria yaitu berusia antara 18-25 tahun dan tinggal di wilayah Kecamatan Kebomas.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Penulis akan mengamati terkait pelaksanaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras dengan cara mencatat, memilih serta menganalisis bahan-bahan data penelitian. Melalui observasi, diharapkan Penulis dapat memperoleh gambaran secara riil terkait peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan fokus permasalahan yaitu efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Hasil yang diperoleh dari observasi adalah Penulis dapat mengetahui seberapa efektif hukum berjalan dan berfungsi dengan baik di masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat

---

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 89-90.

kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada dalam ruang lingkup penelitian atau yang berada di luar ruang lingkup penelitian yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi.

d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencarian data dalam buku-buku atau literatur dan kemudian mengolah data tersebut. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis. Studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan efektivitas hukum serta minuman keras, baik ditinjau dari hukum positif maupun *maqashid syariah*.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 47.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Semua teknik tersebut berjalan secara bersamaan dan saling jalin menjalin.

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data mentah yang diperoleh Peneliti dari catatan-catatan selama melakukan penelitian di lapangan.<sup>16</sup> Reduksi data dilakukan pada saat Penulis memilah, mengolah dan menganalisis data. Hasil yang diperoleh dari reduksi data adalah rangkuman, ringkasan atau uraian singkat serta catatan baik yang bersifat perluasan atau penambahan. Rangkuman yang dimaksud adalah terkait dengan fokus penelitian dan hal-hal yang harus dipaparkan yang berkaitan dengan penelitian.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses analisis data yang memudahkan Peneliti untuk memahami data sebagai informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bagan, uraian singkat, berbagai jenis

---

<sup>16</sup> W. Mantja, *Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan* (Malang: Wineka Media, 2005), hlm. 57.



matrik serta jaringan dan grafis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan adanya bentuk tersebut, maka data menjadi terorganisir dan dapat dirinci secara menyeluruh yang kemudian dicari pola hubungannya agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang tepat.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk final dari analisis data. Kesimpulan pada awalnya bersifat sementara namun akan terus berkembang seiring dengan berjalannya penelitian. Kesimpulan digunakan untuk menjawab dan mengungkap rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Kesimpulan dapat diperoleh dari hasil analisis data yang berasal dari wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi bagian dari penelitian ini yaitu:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

**BAB II** : Berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dan penelitian dalam penelitian yang meliputi tinjauan

teori efektivitas hukum, tinjauan tentang minuman keras, tinjauan tentang Peraturan Daerah dan tinjauan tentang *maqashid syariah*.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang telah dipilih. Bagian ini juga menjadi jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I yaitu terkait efektivitas dan tinjauan *maqashid syariah* terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. Bab ini juga berisi saran dan rekomendasi dari Penulis terkait dengan pengembangan penelitian dari penelitian yang dilakukan Penulis.